



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2024

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JLN. PEMBANGUNAN NO. 21 PADANG HARAPAN
BENGKULU 38225

TELP. (0736) 22231 FAX : (0736) 21585

email : pt-bengkulu@yahoo.com

**ZONA
INTEGRITAS**
NOL KORUPSI





PERNYATAAN TELAH DI REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Bengkulu, 24 Februari 2025

Pereviu I

ZAINURI, SH., M.H.



Pereviu II

SAIMAN, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LKJIP Pengadilan Tinggi Bengkulu 2024 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024. Dalam LKJIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja dan juga analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2024.

Harapan kami LKJIP Pengadilan Tinggi Bengkulu ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat atas tanggung jawab yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, dan juga sebagai pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu di masa yang akan datang.

Bengkulu, 25 Februari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.



Ringkasan Eksekutif

Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Bengkulu ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 8 (delapan) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan cukup baik, yaitu :

1. Sasaran mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Sasaran meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar 100,83%.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam grafik dan tabel disamping :

Tabel 1.

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	27,90%	26%	107,31%
Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan	96,98%	96%	101,02%
Rata-rata Capaian Kinerja			101,66%

Tabel 2.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja			100%



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	→	i
KATA PENGANTAR	→	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	→	iii
DAFTAR ISI	→	iv
DAFTAR TABEL	→	v
DAFTAR GRAFIK	→	vi
DAFTAR GAMBAR	→	vii
BAB I PENDAHULUAN		1
Latar Belakang	→	2
Tugas Pokok dan Fungsi	→	4
Struktur Organisasi	→	5
Isu Strategis	→	8
Sistem Penyajian	→	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA		12
Rencana Strategis 2020-2024	→	13
Rencana Kinerja Tahun 2024	→	16
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	→	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		18
Capaian Kinerja Organisasi	→	19
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	→	20
Realisasi Anggaran	→	42
BAB IV PENUTUP		47
Kesimpulan	→	48
Rekomendasi	→	49
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis 1	iii
Tabel 2 Sasaran Strategis 2	iii
Tabel 3 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	2
Tabel 4 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	14
Tabel 5 Rencana Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
Tabel 7 Pengukuran Capaian Kinerja	19
Tabel 8 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	20
Tabel 9 Persentase Perkara Perdata Yang diselesaikan Tepat Waktu	21
Tabel 10 Persentase Perkara Pidana Yang diselesaikan Tepat Waktu	24
Tabel 11 Persentase Perkara Pidana Khusus Yang diselesaikan Tepat Waktu	26
Tabel 12 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	29
Tabel 13 Index Persepsi Kepuasan Stakeholder	31
Tabel 14 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	34
Tabel 15 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	35
Tabel 16 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	37
Tabel 17 Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	40
Tabel 18 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2024	43
Tabel 19 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2024	43
Tabel 20 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2024	44
Tabel 22 Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara Pidana	44
Tabel 23 Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara Pidana	44
Tabel 24 Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024	45
Tabel 25 Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2024	45
Tabel 26 Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2024 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja	46



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	20
Grafik 2. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	21
Grafik 3. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	23
Grafik 4. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan	26
Grafik 5. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	29
Grafik 6. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	34
Grafik 7. Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	35
Grafik 8. Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	37
Grafik 9. Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	40
Grafik 10. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2024	43
Grafik 11. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2024	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu	6
Gambar 3. Rincian Biaya Perkaya di SIPP	45





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa pemerintahan yang akuntabel dapat terlihat dimulai dari kualitasnya sistem perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya sistem evaluasi kinerja internal.

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor tanggal tentang, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu atas penggunaan anggaran tahun 2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini telah membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Capaian Kinerja.

Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Propinsi Bengkulu yaitu :

Tabel 3. Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI	WILAYAH HUKUM	KELAS
1.	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kelas 1A
2.	PENGADILAN NEGERI CURUP	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	Kelas 1B
3.	PENGADILAN NEGERI MANNA	Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kelas II
4.	PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR	Argamakmur	Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Tengah	Kelas II
5.	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Bintuhan	Kabupaten Kaur	Kelas II
6.	PENGADILAN NEGERI TAIS	Tais	Kabupaten Seluma	Kelas II
7.	PENGADILAN NEGERI TUBEI	Tubei	Kabupaten Lebong	Kelas II
8.	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	Kepahiang	Kabupaten Kepahiang	Kelas II
9.	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	Mukomuko	Kabupaten Mukomuko	Kelas II



PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut:



Fungsi Mengadili

Yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi.



Fungsi Pembinaan

Yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi, peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.



Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural dan Pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.



Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.



Fungsi Administrasi

Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, secara ringkas dituangkan pada bagan berikut :

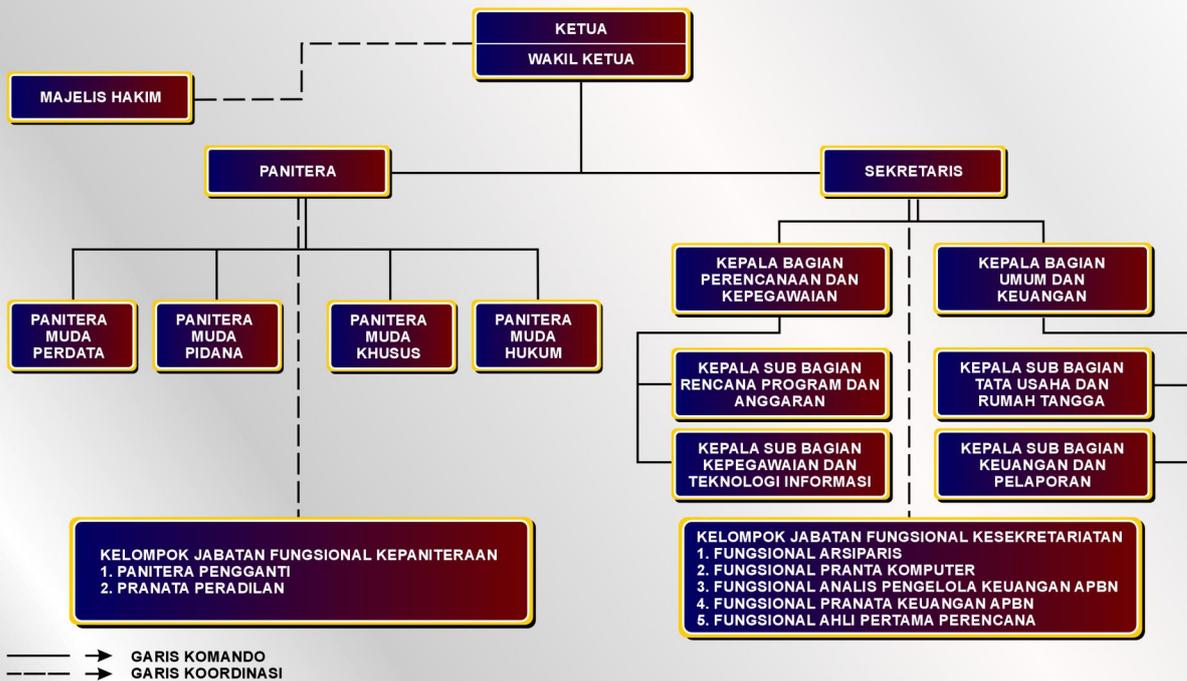


ZONA INTEGRITAS **MeRUPSI**

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



KETUA PENGADILAN TINGGI

Ketua Pengadilan Tinggi sebagai pimpinan Pengadilan Tinggi bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi pada Pengadilan Tinggi.

WAKIL KETUA

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi membantu Ketua Pengadilan Tinggi melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peadilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama.

HAKIM TINGGI

Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi.

PANITERA

Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Terdiri atas:

1. **Panitera Muda Perdata**
Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata
2. **Panitera Muda Pidana**
Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
3. **Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor**
Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
4. **Panitera Muda Hukum**
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.



ZONA INTEGRITAS
#BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim Tinggi dalam persidangan perkara perdata, pidana dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

SEKRETARIS

Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi terdiri atas:

- A. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**
Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.
- B. Bagian Umum dan Keuangan**
Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Terdiri atas :

- 1. Subbag Rencana Program dan Anggaran**
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
- 2. Subbag Kepegawaian Teknologi Informasi**
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Terdiri atas :

- 1. Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga**
Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi tata usaha dan rumah tangga, keprotokolan, perpustakaan serta hubungan masyarakat.
- 2. Subbag Keuangan dan Pelaporan**
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan keuangan serta pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Terdiri atas :

- 1. Pranata Komputer**
Mempunyai tugas menganalisis informasi, perancangan sistem informasi, perancangan sistem komputer, perancangan dan pengembangan database.
- 2. Arsiparis**
Mempunyai tugas melakukan identifikasi, verifikasi dan penyusunan daftar salinan autentik dan naskah asli arsip terjaga.

KELOMPOK PELAKSANA

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan dari masing-masing subbagian pelaksana tersebut ditempatkan.

D. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis sepanjang Tahun 2024 terkait dengan kemajuan atau pun perubahan di lembaga peradilan umum khususnya pada Pengadilan Tinggi Bengkulu antara lain :



PENANDATANGANAN FAKTA INTEGRITAS BERSAMA TAHUN 2024

Penandatanganan Fakta Integritas Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Tahun 2024 yang bertempat di Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 10 Januari 2024



SOSIALISASI PERPU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pada tanggal 11 Januari 2024 dilaksanakan Sosialisasi UU Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Perpu No 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum bertempat di Ruang Serba Guna Pengadilan Tinggi Bengkulu dan sosialisasi dipimpin oleh KPT Bengkulu Bapak Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H. Kegiatan ini dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai Hukum Acara dan Tindak Pidana Pemilu kepada seluruh Hakim dan Pegawai mengingat akan dilaksanakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.



KUNJUNGAN KERJA KETUA PT BENGKULU KE KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Pada tanggal 23 Januari 2024 Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H. mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkulu Tengah dan melakukan audiensi dengan Plt Bupati Bengkulu Tengah Bapak Dr. Heryandi Roni, M.Si. tentang langkah strategis yang akan dilakukan dalam mendukung segera terbentuknya Pengadilan baru di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai hasil Pemekaran dari Pengadilan Negeri Arga Makmur.



ZONA INTEGRITAS



BerAKHLAK #bangga melayani bangsa



PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH DITJEN BADILUM KEPADA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2023

Pemberian Penghargaan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Terbaik Tahun Anggaran 2023 kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Kategori UAPPA-W Laporan Penyusunan Keuangan Tahunan yang berkualitas yang membawahi 10 sampai dengan 18 Pengadilan Negeri pada tanggal 26 Januari 2024.



PELANTIKAN PENGURUS DAERAH IKAH I SELURUH INDONESIA PERIODE 2023-2026 DAN RAPAT KOORDINASI IKAH I

Pada tanggal 30 Januari 2024 bertempat di Ruang Soebekti Pengadilan Tinggi Bengkulu dilaksanakan kegiatan Pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) seluruh Indonesia secara daring melalui Zoom untuk periode 2023-2026.



PEMBINAAN ZONA INTEGRITAS DAN AMPUH OLEH PENGADILAN TINGGI BENGKULU TERHADAP PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pada tanggal 02 Mei 2024 Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu di damping Wakil Ketua dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan pembinaan Zona Integritas dan AMPUH terhadap Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu



ZONA INTEGRITAS
KORPRI

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

KPT Bengkulu Bapak Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H. membuka acara pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan Kebijakan Modernisasi Manajemen Perkara Pada Mahkamah Agung RI yang disampaikan oleh Panitera PT Bengkulu Bapak Drs. Asmar Josen, S.h., M.H. pada tanggal 03 Juni 2024.



KUNJUNGAN KERJA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pada tanggal 01 September 2024 Ketua Mahkamah Agung RI YM Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk memberikan pembinaan secara langsung yang menekankan pentingnya integritas sebagai pilar utama dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan.



WISUDA DAN PURNABAKTI KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Bertempat di Ruang Serba Guna Pengadilan Tinggi Bengkulu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM Prof. Dr, H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. telah melaksanakan Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu YM Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis dan Sistematika Penyajian;

Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;

Bab III Akuntabilitas Kinerja,

Pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisa nya dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Bab IV Penutup,

Pada bab ini disajikan kesimpulan secara umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah-langkah yang akan diambil di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Penghargaan yang diterima Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2024.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui perencanaan yang efektif, terarah dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tinggi Bengkulu menyusun Rencana Strategis 2020-2024 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.



1. VISI

Visi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

"MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU YANG AGUNG"

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Bengkulu lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil rewi Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2020 sampai dengan 2024, sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - 1) Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
 - 2) Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
 - 3) Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu ;
 - 4) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
 - 5) Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - 1) Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
 - 2) Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
 - 3) Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja tersebut telah direwi untuk mempertajam Sasaran Strategis. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan
			b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
			c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan
			e. Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan Peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan dengan Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM lebih dari atau sama dengan 80.
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus
			b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus
			c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diputus

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut :

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian Indikator Kinerja : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

b. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk menunjang pelayanan peradilan.

c. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana.

Program dan kegiatan ini untuk memenuhi layanan dukungan manajemen pengadilan sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar dalam menetapkan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau disebut juga dengan Perjanjian Kinerja



Tabel 5 Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	1 layanan	Rp. 22.077.318.000,-
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %					
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	26 %					
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan	96 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung RI	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 layanan	Rp. 522.000.000,-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	142 perkara	Rp. 181.300.000,-
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%					
		Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%					

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2024 merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan.



Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	26%
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan	96%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp. 22.077.318.000
 Rp. 522.000.000
 Rp. 181.300.000



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
#melayani
#bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak. Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2024 adalah sebesar **100,83 %**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 7 Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	27,90 %	26 %	107,31 %
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan	96,98 %	96 %	101,02 %
Rata-rata Capaian Sasaran					101,66 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Sasaran					100 %

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

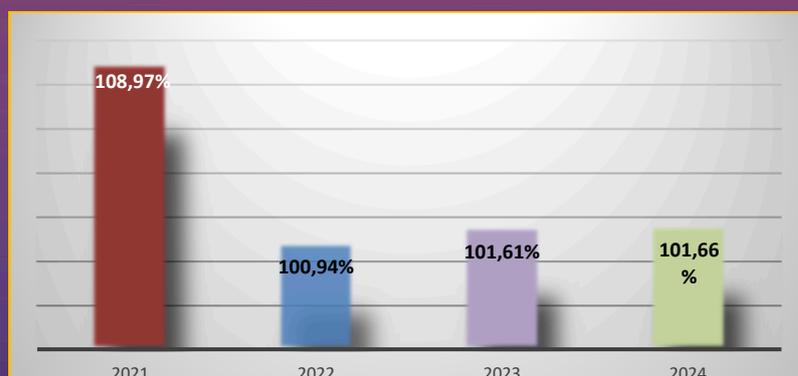
SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tabel 8 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	156,86%	100,40%	107,79%	107,31%
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	114,94%	104,28%	100,26%	101,02%
Capaian Sasaran I	108,97%	100,94%	101,61%	101,66%

Grafik 1 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan upaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, ketepatan waktu penyelesaian perkara, penurunan sisa perkara, kepuasan terhadap hasil putusan serta kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Pada sasaran ini terdapat 5 indikator kinerja yang diukur.

Data pada tabel 4 dan grafik 1 menunjukkan bahwa capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2024 sebesar 101,66%. Persentase capaian tahun 2024 ini meningkat bila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2023 yaitu sebesar 101,61%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan capaian sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

SASARAN 1 INDIKATOR 1

PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Secara umum capaian indikator ini baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara perdata pada tahun 2024 sebanyak 33 perkara, selama tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 33 perkara dan perkara perdata yang diputus tepat waktu juga sebanyak 33 perkara. Dengan demikian tahun 2024 indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 9 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2024	PERDATA	33	33	100%	100%	100%
2023	PERDATA	40	40	100%	100%	100%
2022	PERDATA	35	35	100%	100%	100%
2021	PERDATA	46	46	100%	100%	100%

Grafik 2 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2024 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2024 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 99,68%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2024 dengan selisih lebih sebesar 0,32%.

***Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2024 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu :

- a. Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- b. SOP Penyelesaian Perkara Perdata telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
- c. Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.22.689.318.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.658.520.925,- atau sebesar 99,86%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,14%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((22.689.318.000 \times 1,00) - (22.658.520.925))}{\sum_{i=1}^n (22.689.318.000 \times 1,00)} \times 100\%$$

$$E = 0,14\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi Anggaran
- PAKi : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja
- CKi : Capaian Indikator Kinerja
- RAKi : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2024 adalah sebesar 100%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, mencakup IKK Tata Kelola Administrasi Peradilan Umum. Hal ini semakin mempermudah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan didukung oleh faktor-faktor lainnya (SDM yang berintegritas, profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara Perdata).

SASARAN 1 INDIKATOR 2

PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutas. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Secara umum capaian indikator ini baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara pidana pada tahun 2024 sebanyak 382 perkara, selama tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 382 perkara dan perkara pidana yang diputus tepat waktu juga sebanyak 382 perkara. Dengan demikian tahun 2024 indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 10 Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2024	PIDANA	382	382	100%	100%	100%
2023	PIDANA	228	228	100%	100%	100%
2022	PIDANA	158	158	100%	100%	100%
2021	PIDANA	145	145	100%	100%	100%

Grafik 3 Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2024 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2024 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 99,69%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2024 dengan selisih lebih sebesar 0,31%.

*Standar Nasional tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2024 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu :

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
- Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.22.764.869.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.733.635.425,- atau sebesar 99,86%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,14%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((22.764.869.000 \times 1,00) - (22.733.635.425))}{\sum_{i=1}^n (22.764.869.000 \times 1,00)} \times 100\%$$
$$E = 0,14\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi Anggaran
PAKi: Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja
CKi : Capaian Indikator Kinerja
RAKi: Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2024 adalah sebesar 100%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, mencakup diantaranya KRO/RO Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Banding yang secara khusus menjadi penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini, karena pada kegiatan ini terdapat komponen anggaran Pengiriman Surat Penahanan, Pencatatan Register Banding dan Minutasi. Ketersediaan anggaran ini semakin mempermudah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan didukung oleh faktor-faktor lainnya (SDM yang berintegritas, profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara Pidana)

SASARAN 1 INDIKATOR 3

PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Secara umum capaian kinerja indikator ini baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara pidana khusus pada tahun 2024 sebanyak 15 perkara, selama tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 15 perkara dan perkara pidana khusus yang diputus tepat waktu juga sebanyak 15 perkara. Dengan demikian tahun 2024 indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 11 Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2024	PIDANA KHUSUS	15	15	100%	100%	100%
2023	PIDANA KHUSUS	7	7	100%	100%	100%
2022	PIDANA KHUSUS	8	8	100%	100%	100%
2021	PIDANA KHUSUS	21	21	100%	100%	100%

Grafik 4 Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2024 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2024 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 99,44%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2024 dengan selisih lebih sebesar 0,56%.

***Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2024 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu:

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
- Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.22.705.067.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.674.169.925,- atau sebesar 99,86%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,14%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((22.705.067.000 \times 1,00) - (22.674.169.925))}{\sum_{i=1}^n (22.705.067.000 \times 1,00)} \times 100\%$$
$$E = 0,14\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi Anggaran
PAKi : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja
CKi : Capaian Indikator Kinerja
RAKi : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2024 adalah sebesar 100%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, mencakup diantaranya KRO/RO Penyelesaian Perkara Pidana Khusus di Tingkat Banding yang secara khusus menjadi penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini, karena pada kegiatan ini terdapat komponen anggaran Pengiriman Surat Penahanan, Pencatatan Register Banding dan Minutasi. Ketersediaan anggaran ini semakin mempermudah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan didukung oleh faktor-faktor lainnya (SDM yang berintegritas, profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus).

SASARAN 1 INDIKATOR 4

PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang diputus tahun berjalan. Semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum kasasi, maka diasumsikan semakin banyak para pencari keadilan yang puas dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Sesuai tabel di bawah ini, secara umum Capaian Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Tahun 2024 mencapai 107,31%.

Tabel 12 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

TAHUN	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI	JUMLAH PUTUSAN PERKARA BANDING	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2024	120	430	27,90 %	26%	107,31 %
2023	83	275	30,18 %	28%	107,79 %
2022	111	201	55,22 %	55%	100,40 %
2021	80	170	47,06 %	30%	156,86 %

Grafik 5 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah sebesar 26%. Realisasi pada indikator tersebut adalah sebesar 27,90%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

- a. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi menurun sebesar 2,28%, target menurun sebesar 2% (sebelumnya 28% menjadi 26%) dan capaian kinerja menurun sebesar 0,48%. Penurunan persentase target ini dianggap perlu setelah melalui monev capaian kinerja di tahun 2024, yang diperkirakan angka capaian kinerja hanya bisa mencapai maksimal sesuai target pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu dianggap perlu untuk melakukan revisi target kinerja pada indikator ini. Namun selain hal tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu tetap mengupayakan pemberian pelayanan yang optimal untuk memaksimalkan kepuasan para pencari keadilan atas keputusan banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- b. Jika dibandingkan capaian kinerja selama tahun 2021-2023 maka dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian mengalami kenaikan dan penurunan, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator tersebut memiliki tren/kecenderungan yang meningkat.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 55% pada Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 27,90%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun belum dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu. Hal ini disebabkan karena tingkat kepuasan para pencari keadilan atas putusan merupakan hal yang cukup subjektif, kepuasan bagi satu pihak belum pasti merupakan kepuasan bagi pihak lainnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2024 adalah sebesar 27,90%, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 45,48%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu belum berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2024 dengan selisih sebesar 17,58%.

*Standar Nasional tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2024 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah:

- a. Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menghasilkan putusan hukum yang berkualitas yaitu putusan yang memenuhi kriteria kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*purposiveness*);
- b. Monitoring dan Evaluasi yang rutin dilaksanakan dalam memantau capaian kinerja setiap triwulannya dalam mengantisipasi persentase capaian kinerja dan perubahan target kinerja

maupun dalam upaya mengoptimalkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;

- c. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah 107,31% dengan target 26% dan realisasi 27,90%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.22.689.318.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.658.520.925,- atau sebesar 99,86%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,94%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((22.689.318.000 \times 1,07) - (22.658.520.925))}{\sum_{i=1}^n (22.689.318.000 \times 1,07)} \times 100\%$$

$$E = 6,94\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi Anggaran

PAKi : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

Cki : Capaian Indikator Kinerja

RAKi: Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

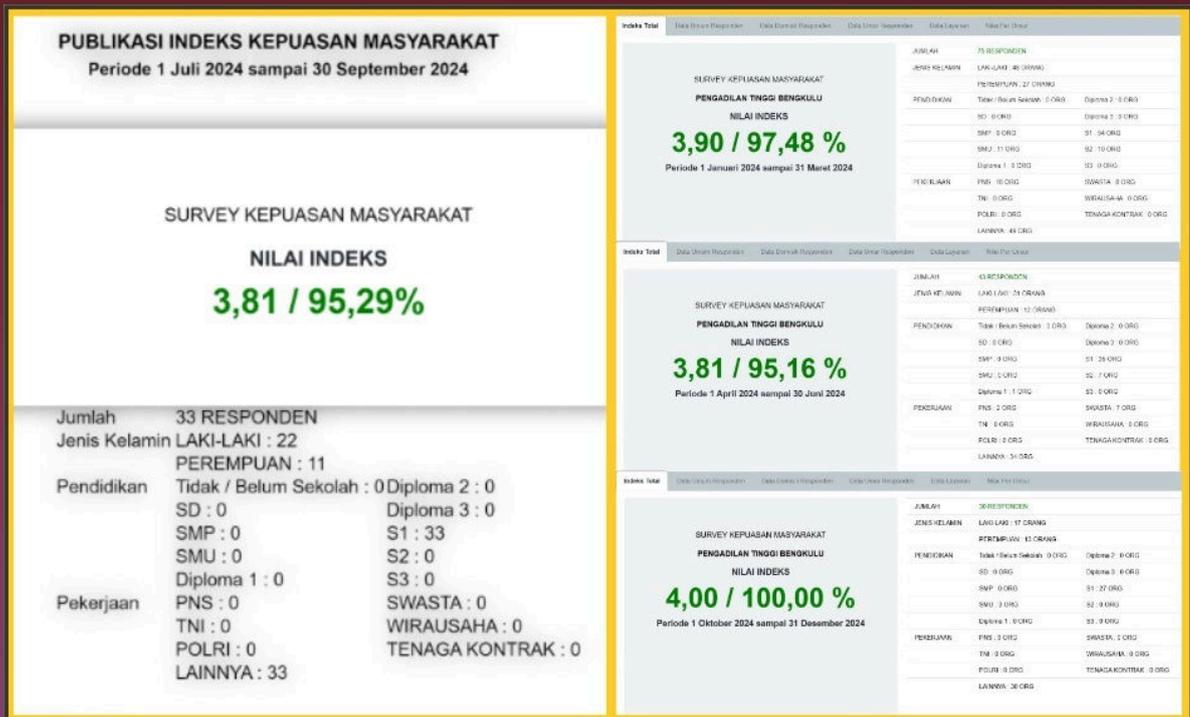
SASARAN 1 INDIKATOR 5

INDEX PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Penetapan indikator kinerja ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan hukum di lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel 13 Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Bengkulu

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2024	Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan peradilan	96,98	96	101,02%
2023	Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan peradilan	96,25	96	100,26%
2022	Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan peradilan	99,07	95	104,28%
2021	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100,00	87	114,9%



Survey Index Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap Triwulanan. Populasi survey ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan dari sejumlah 100 (seratus) orang responden dan berdasarkan hasil survey tersebut seluruh responden mayoritas memberikan penilaian puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator kinerja Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar 96%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2024 juga 96,98%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang juga berhasil mencapai target melebihi 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat memberikan layanan terbaik kepada para masyarakat pencari keadilan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 97% pada Indikator Kinerja Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 96,25%. Jika dibandingkan maka dapat

dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun belum dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2024 adalah sebesar 96,98%, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 97,38%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu belum melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2024 dengan selisih sebesar 0,40%.

*Standar Nasional tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2024 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan :

- a. Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pencari hukum di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu
- b. Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat pencari hukum di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan adalah 101,02% dengan target 96% dan realisasi 96,98%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.22.599.318.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.568.835.925,- atau sebesar 99,87%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,14%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((22.599.318.000 \times 1,01) - (22.568.835.925))}{\sum_{i=1}^n (22.599.318.000 \times 1,01)} \times 100\%$$
$$E = 1,14\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi Anggaran
PAKi : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja
CKi : Capaian Indikator Kinerja
RAKi : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

SASARAN STRATEGIS 2

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Tabel 14 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Capaian Sasaran	100%	100%	100%	100%

Grafik 6 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kembali ke Pengadilan Pengaju. Data pada tabel 19 dan grafik 9 menunjukkan bahwa capaian sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2024 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan sasaran untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Bengkulu di tahun 2024 ini telah tercapai dengan sangat baik.

SASARAN 2 INDIKATOR 1

PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERDATA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Tahun 2024 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 15 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2024	PERDATA	33	33	100%	100%	100%
2023	PERDATA	40	40	100%	100%	100%
2022	PERDATA	35	35	100%	100%	100%
2021	PERDATA	46	46	100%	100%	100%

Grafik 7 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2024 adalah sebanyak 33 perkara dan seluruh salinan putusan perkara perdata tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu langsung mengirim salinan putusan perkara perdata selalu tepat waktu. Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2024 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara termasuk pelaksanaan pengiriman putusan perkara.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2024 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 99,93%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2024 dengan selisih lebih sebesar 0,07%.

*Standar Nasional tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2024 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu :

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempedomani dan melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- SOP Penyelesaian Perkara Perdata yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya.
- Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, tuntas dan bertanggung jawab.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.22.689.318.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.658.520.925,- atau sebesar 99,86%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,14%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((22.689.318.000 \times 1,00) - (22.658.520.925))}{\sum_{i=1}^n (22.689.318.000 \times 1,00)} \times 100\%$$
$$E = 0,14\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi Anggaran
PAKi : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja
CKi : Capaian Indikator Kinerja
RAKi : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata di tahun 2024 adalah sebesar 100%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, mencakup IKK Tata Kelola Administrasi Peradilan Umum. Hal ini semakin mempermudah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan didukung oleh faktor-faktor lainnya (SDM yang berintegritas, profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara Perdata).

SASARAN 2 INDIKATOR 2

PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PIDANA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus. Tahun 2024 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 16 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2024	PIDANA	382	382	100%	100%	100%
2023	PIDANA	228	228	100%	100%	100%
2022	PIDANA	158	158	100%	100%	100%
2021	PIDANA	145	145	100%	100%	100%

Grafik 8 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2024 adalah sebanyak 382 perkara dan seluruh salinan putusan perkara pidana tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu langsung mengirim salinan putusan perkara pidana selalu tepat waktu. Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2024 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara termasuk pelaksanaan pengiriman putusan perkara.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2024 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 99,92%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2024 dengan selisih lebih sebesar 0,08%.

***Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2024 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu:

- a. Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempedomani dan melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- b. SOP Penyelesaian Perkara Perdata yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya.
- c. Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, tuntas dan bertanggung jawab.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.22.764.869.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.733.635.425,- atau sebesar 99,86%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,14%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((22.764.869.000 \times 1,00) - (22.733.635.425))}{\sum_{i=1}^n (22.764.869.000 \times 1,00)} \times 100\%$$
$$E = 0,14\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi Anggaran
- PAKi : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja
- CKi : Capaian Indikator Kinerja
- RAKi : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana di tahun 2024 adalah sebesar 100%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, mencakup diantaranya KRO/RO Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Banding yang secara khusus menjadi penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini, karena pada kegiatan ini terdapat komponen anggaran Pengiriman Salinan Putusan kepada Pengadilan Pengaju. Ketersediaan anggaran ini semakin mempermudah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan didukung oleh faktor-faktor lainnya (SDM yang berintegritas, profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara Pidana).

SASARAN 2 INDIKATOR 3

PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PIDANA KHUSUS YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diputus. Tahun 2024 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 17 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2024	PIDANA KHUSUS	15	15	100%	100%	100%
2023	PIDANA KHUSUS	7	7	100%	100%	100%
2022	PIDANA KHUSUS	8	8	100%	100%	100%
2021	PIDANA KHUSUS	21	21	100%	100%	100%

Grafik 9 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Jumlah putusan perkara pidana khusus pada tahun 2024 adalah sebanyak 15 perkara dan seluruh salinan putusan perkara pidana khusus tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu langsung mengirim salinan putusan perkara pidana khusus selalu tepat waktu. Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2024 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara termasuk pelaksanaan pengiriman putusan perkara.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2024 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 99,58%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2024 dengan selisih lebih sebesar 0,42%.

*Standar Nasional tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2024 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu :

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempedomani dan melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- SOP Penyelesaian Perkara Perdata yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya.
- Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, tuntas dan bertanggung jawab.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.22.705.067.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.674.169.925,- atau sebesar 99,86%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,14%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((22.705.067.000 \times 1,00) - (22.674.169.925))}{\sum_{i=1}^n (22.705.067.000 \times 1,00)} \times 100\%$$
$$E = 0,14\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi Anggaran
PAKi : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja
CKi : Capaian Indikator Kinerja
RAKi : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus di tahun 2024 adalah sebesar 100%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, mencakup diantaranya KRO/RO Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi di Tingkat Banding yang secara khusus menjadi penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini, karena pada kegiatan ini terdapat komponen anggaran Pengiriman Salinan Putusan kepada Pengadilan Pengaju. Ketersediaan anggaran ini semakin mempermudah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan didukung oleh faktor-faktor lainnya (SDM yang berintegritas, profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus).

B. REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran yang didapatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 22.780.618.000,- (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut:

1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 22.599.318.000,- (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 19.076.163.053,- (*Sembilan Belas Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah*)

b. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Jumlah Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.2.973.388.653,- (*Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

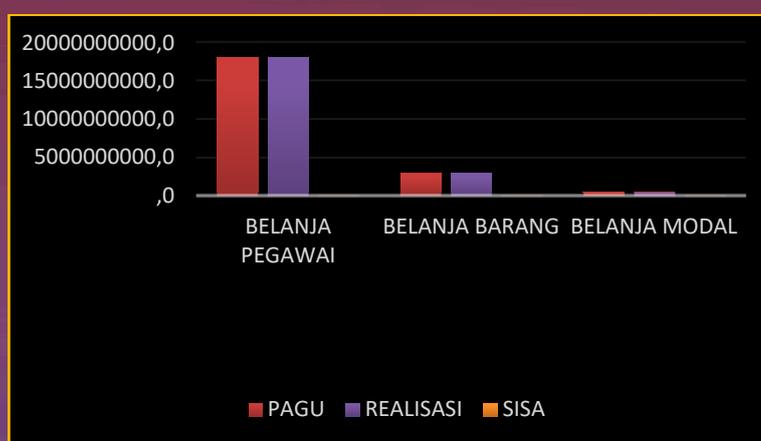
c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 519.284.219,- (*Lima Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*).

Tabel 18 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2024

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Pegawai	19.087.214.000	19.076.163.053	11.050.947	99,94%
Belanja Barang	2.990.104.000	2.973.388.653	16.715.347	99,44%
Belanja Modal	522.000.000	519.284.219	2.715.781	99,48%
TOTAL	22.599.318.000	22.568.835.925	30.482.075	99,87%

Grafik 10 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2024



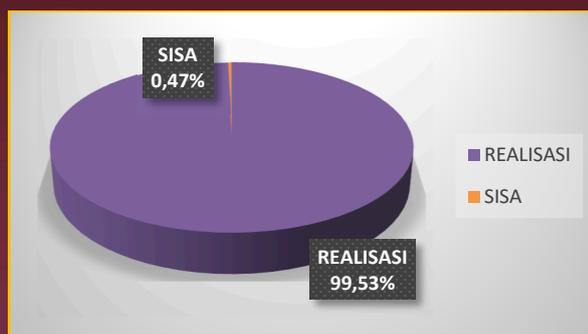
2. DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)

Tahun 2024 ini Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum berupa Belanja Barang sejumlah Rp.181.300.000,- (*Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*). Belanja Barang pada DIPA 03 ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Tabel 19 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2024

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Barang	181.300.000	180.448.500	851.500	99,53%
TOTAL	181.300.000	180.448.500	851.500	99,53%

Grafik 11 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2024



REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sedangkan DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 20 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2024

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding	22.077.318.000	22.049.551.706	27.766.294	99,87
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	522.000.000	519.284.219	2.715.781	99,48
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	181.300.000	180.448.500	851.500	99,53

Tabel 21 Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara Pidana

NO	URAIAN	VOLUME	REALISASI
1	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	145	382
2	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	22	15

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 22 Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara Pidana

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	75.551.000	75.114.500	99,42	436.500
2.	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	15.749.000	15.649.000	99,37	100.000

INFORMASI KEUANGAN YANG DIBIYAI OLEH PARA PIHAK (Perkara Perdata)

Tabel 23 Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024

SISA 2023	MASUK 2024	PUTUS 2024	SISA 2024
5	30	33	2

Tabel 24 Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2024

URAIAN	SALDO AWAL (Des 23)	PENERIMAAN 2024	PENGELUARAN 2024	SALDO AKHIR 2024 (Saldo Awal + Penerimaan - Pengeluaran)
Biaya Perkara	Rp. 750.000	Rp. 150.000 x 33 berkas = Rp. 4.950.000	Rp. 150.000 x 33 berkas = Rp. 4.950.000	Rp. 750.000

Adapun rincian biaya perkara perdata sebesar Rp.150.000,- adalah sebagai berikut :

Biaya Pemberkasan : Rp. 130.000,-
 Biaya Materai : Rp. 10.000,-
 Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- +
 Total : Rp. 150.000,-

Gambar 3 Rician Biaya Perkara Perdata di SIPP

Home Perdata Banding Banding Pidana Pidana Anak Tipikor SPPT Laporan Jadwal Sidang System Pesan Arsip Perkara

INFORMASI DETAIL PERKARA BANDING

[Kembali](#)

Nama Pengadilan TK I / Nomor Perkara	Tanggal Putusan TK I / Jenis Perkara	Nomor Perkara Tingkat Banding	Majelis Hakim / Panitera Pengganti	Status Perkara Lama Proses Perkara
Nama Pengadilan : PENGADILAN NEGERI BENGKULU Nomor Perkara : 12/Pdt.G/2024/PN Bgl	Tanggal Putusan: Rabu, 20 Nov. 2024 Jenis Perkara : Wanprestasi	eCourt 30/PDT/2024/PT BGL	Majelis Hakim : Hakim Ketua : R AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H. Hakim Anggota : MERRYWATI TB, S.H., M.H. Hakim Anggota : YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H. Panitera Pengganti: MANZIR, S.H.	Status Terakhir : Minutasi Lama Proses : 28 Hari

[Berkas](#) [Data Umum](#) [Penetapan](#) [Court Calendar](#) [Jadwal Sidang](#) [Pertimbangan Hukum](#) [Putusan Akhir](#) [Tanda Tangan Elektronik](#) **Biaya Perkara** [Riwayat Perkara](#)

Biaya Tingkat Banding

No	Tanggal Transaksi	Uraian	Jumlah			Keterangan
			Pemasukan	Pengeluaran	Sisa	
1	Kamis, 19 Des. 2024	Biaya Perkara	Rp. 150.000		Rp. 150.000	
2	Kamis, 19 Des. 2024	Biaya Pemberkasan		Rp. 130.000	Rp. 20.000	
3	Kamis, 16 Jan. 2025	Materai		Rp. 10.000	Rp. 10.000	
4	Kamis, 16 Jan. 2025	Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 0	
Total			Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 0	

Load Time : 0.0602 Sec, Memory Available: 5048M, Memory Usage : 4.38MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Version: 5.0.0

Tabel 25 Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2024 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Program : Dukungan Manajemen Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	21.471.775.000	a. Belanja Non Operasional b. Belanja Gaji dan Tunjangan c. Belanja Operasional	21.054.738.000	21.449.824.073	99,90
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu							
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu							
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi							
		e. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Program : Dukungan Manajemen Kegiatan : Pengadaan Sarana & Prasarana di Lingkungan MA	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	417.073.000	a. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	417.073.000	416.470.050	99,86
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	174.500.000	Belanja Barang	171.619.760	2.880.240	98,35
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu							
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu							



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2024 menyajikan 2 (dua) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 5 indikator pada Sasaran I Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan 3 indikator pada Sasaran II Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan "Berhasil" karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 100,83%. Dari 8 indikator kinerja yang diperjanjikan, seluruhnya dinyatakan berhasil karena dapat mencapai target, bahkan ada 2 indikator kinerja yang melampaui target yang diperjanjikan.

Capaian sasaran tahun 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu telah terlaksana dengan baik. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Peningkatan fungsi pengawasan bidang dan asesmen internal secara rutin dan berkala
2. Adanya berbagai kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti kegiatan Bimtek, Diklat, Sosialisasi dan Pembinaan
4. Berbagai Inovasi yang diciptakan dan terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi oleh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu
5. Adanya ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.

Hasil Capaian Kinerja pada LKjIP 2024 selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

B. REKOMENDASI

Walaupun pada tahun 2024 ini seluruh target dapat tercapai namun tetap harus dipersiapkan dalam menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang bisa menyebabkan tidak tercapainya sasaran di masa yang akan datang. Ini sebagai bentuk upaya preventif Pengadilan Tinggi Bengkulu agar tetap bisa mempertahankan capaian kinerja yang baik dan maksimal tersebut di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu direkomendasikan untuk terus melakukan :

1. Penguatan Organisasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Penguatan Pengawasan internal maupun eksternal serta monitoring evaluasi secara berkala dari Pimpinan Pengadilan
3. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat dan civil society sebagai bagian integral dari pengadilan
4. Penguatan Produktifitas dan Administrasi penyelesaian perkara
5. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
6. Peningkatan Sarana Prasarana dan kualitas lingkungan kerja.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
#melayani
#bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN 1

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI BENGKULU



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 NOMOR : 2472/KPT.W8-U/RA1.10/X/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. JONI, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Pihak Kedua

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Bengkulu, 16 Oktober 2024
Pihak Pertama


Dr. JONI, S.H., M.H.

REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Nomor : 2472/KPT.W8-U/RA1.10/X/2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	26%
		Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas Terhadap Layanan Peradilan	96%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 21.792.318.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung	Rp. 522.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 181.300.000



Pihak Kedua

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.



Bengkulu, 16 Oktober 2024

Pihak Pertama

Dr. JONI, S.H., M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
#melayani
#bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN 2

CAPAIAN KINERJA NASIONAL TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI BENGKULU



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id., ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 246/DJU/OT1.6/II/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Data Target dan Capaian
Kinerja Pengadilan Tinggi
seluruh Indonesia Tahun 2024

Jakarta, 24 Februari 2025

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, bersama ini dengan hormat dilampirkan data Target dan Capaian Kinerja nasional pada Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tahun 2024 sebagai bahan analisis perbandingan informasi Target Kinerja satuan kerja dengan Realisasi Kinerja (*benchmark*).

Demikian untuk diketahui.



LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
 Nomor : 246/DJU/OT1.6/II/2025
 Tanggal: 24 Februari 2025

REKAPAN DATA CAPAIAN KINERJA NASIONAL LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2024

No	Kode Satker	Kode Wilayah	Satuan Kerja	Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel												Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara									KATEGORI PENGADILAN			
				Indikator Kinerja																								
				Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			Persentase perkara Pidana Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu				Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
1	099062	0100	Pengadilan Tinggi Jakarta	96	99,81	103,97	96	99,45	103,59	96	100	104,17	78,00	84,57	108,42	90,00	95,00	105,56	95	99,72	104,97	93	97,25	104,57	96	100	104,17	> 1000 Perkara
2	099067	0200	Pengadilan Tinggi Bandung	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	33,75	33,91	100,47	90,00	99,50	110,56	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	> 1000 Perkara
3	099090	0300	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26	50,00	55,27	110,54	95,00	99,34	104,57	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26	> 1000 Perkara
4	400343	0400	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	100	99,25	99,25	100	100	100,00	100	100	100,00	40,00	45,33	113,33	95,00	93,84	98,78	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	< 300 Perkara
5	099132	0500	Pengadilan Tinggi Surabaya	96	99,27	103,41	96	99,9	104,06	96	100	104,17	56,00	59,77	106,73	95,00	98,26	103,43	98	100	102,04	98	99,9	101,94	98	100	102,04	> 1000 Perkara
6	099169	0600	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	98	97,62	99,61	98	100	102,04	98	100	102,04	40,00	52,73	131,83	90,00	97,87	108,74	99	100	101,01	99	100	101,01	99	100	101,01	301-1000 Perkara
7	099189	0700	Pengadilan Tinggi Medan	88	100	113,64	94	100	106,38	97	100	103,09	40,00	73,00	182,50	96,00	96,25	100,26	96	100	104,17	98	100	102,04	96	100	104,17	> 1000 Perkara
8	099204	0800	Pengadilan Tinggi Padang	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	57,00	59,00	103,51	95,00	94,55	99,53	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	301-1000 Perkara
9	400493	0900	Pengadilan Tinggi Riau	97	100	103,1	97	100	103,1	100	100	100,00	40,00	41,8	104,5	97,00	99,9	103,0	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	301-1000 Perkara
10	400504	1000	Pengadilan Tinggi Jambi	96	99,4	103,54	98	100	102,04	96	100	104,17	35,00	38,38	109,66	93,00	99,30	106,77	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	301-1000 Perkara
11	099225	1100	Pengadilan Tinggi Palembang	100	99,26	99,26	100	100	100,00	100	100	100,00	53,00	48,01	90,58	93,00	98,61	106,03	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	301-1000 Perkara
12	400365	1200	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	93	97	104,30	90	90	100,00	93	100	107,53	45,00	48,00	106,67	92,00	92,00	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	301-1000 Perkara
13	400252	1300	Pengadilan Tinggi Pontianak	96	98,34	102,44	96	100	104,17	96	100	104,17	34,00	36,17	106,38	95,00	99,36	104,59	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	301-1000 Perkara
14	400359	1400	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	25,00	32,80	131,20	94,00	99,50	105,85	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	< 300 Perkara
15	099253	1500	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	40,00	43,88	109,70	90,00	99,97	111,08	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	301-1000 Perkara
16	400529	1600	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	34,00	38,43	113,03	85,00	98,98	116,45	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	301-1000 Perkara
17	099313	1700	Pengadilan Tinggi Manado	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26	35,00	39,18	111,94	90,00	94,89	105,43	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26	301-1000 Perkara
18	400535	1800	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	39,33	40,20	102,21	96,00	98,99	103,11	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	< 300 Perkara
19	099419	1900	Pengadilan Tinggi Makassar	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	45,00	49,35	109,67	90,00	94,19	104,66	95	99,25	104,47	95	100	105,26	95	86,15	90,68	> 1000 Perkara
20	400541	2000	Pengadilan Tinggi Kendari	90	100	111,11	90	100	111,11	90	100	111,11	30,00	40,00	133,33	90,00	96,82	107,58	90	100	111,11	90	100	111,11	90	100	111,11	< 300 Perkara
21	099692	2100	Pengadilan Tinggi Ambon	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26	35,00	35,58	101,66	95,00	99,13	104,35	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	< 300 Perkara
22	099774	2200	Pengadilan Tinggi Denpasar	95	99,8	105,05	95	100	105,26	95	100	105,26	40,00	40,40	101,00	90,00	97,30	108,11	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	301-1000 Perkara
23	400560	2300	Pengadilan Tinggi Mataram	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	40,00	40,88	102,20	95,00	96,95	102,05	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	301-1000 Perkara
24	400246	2400	Pengadilan Tinggi Kupang	100	99,52	99,52	100	100	100,00	100	100	100,00	25,00	26,96	107,84	95,00	99,63	104,87	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26	301-1000 Perkara
25	400023	2500	Pengadilan Tinggi Jayapura	96	100	104,17	96	100	104,17	96	100	104,17	40,00	50,41	126,03	92,00	96,74	105,15	95	100	105,26	96	100	104,17	95,00	100	105,26	< 300 Perkara
26	400513	2600	Pengadilan Tinggi Bengkulu	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	26,00	27,90	107,31	96,00	96,98	101,02	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	< 300 Perkara
27	664523	2800	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	37,50	47,00	125,33	94,00	103,05	109,63	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	301-1000 Perkara
28	663399	2900	Pengadilan Tinggi Banten	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	45,00	49,00	108,89	90,50	95,24	105,24	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	301-1000 Perkara
29	663404	3000	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	40,00	47,89	119,73	90,00	95,63	106,26	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	< 300 Perkara
30	664540	3100	Pengadilan Tinggi Gorontalo	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	40,00	45,78	114,45	100,00	98,46	98,46	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	< 300 Perkara
31	526707	3200	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	85	100	117,65	85	100	117,65	85	100	117,65	25,00	50,12	200,48	85,00	92,72	109,08	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	< 300 Perkara
32	526717	3300	Pengadilan Tinggi Papua Barat	100	100	100,00	100	100	100,00	100	80,95	80,95	50,00	55,08	110,16	92,00	96,69	105,10	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	< 300 Perkara
33	526713	3400	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	99	100	101,01	99	100	101,01	98	100	102,04	52,00	17,90	34,42	90,00	97,84	108,71	98	100	102,04	98	100	102,04	98	100	102,04	< 300 Perkara
34	526721	3500	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	60,00	51,58	85,97	96,00	97,54	101,60	100	98,64	98,64	100	100	100,00	100	N/A	N/A	< 300 Perkara
Rerata				97,35	99,68	102,55	97,50	99,69	102,36	97,68	99,44	101,95	41,34	45,48	112,69	92,69	97,38	105,16	98,56	99,93	101,46	98,59	99,92	101,41	98,59	99,58	101,10	

Data per 22 Januari 2025





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
#melayani
#bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN 3

ANALISIS EFISIENSI PENGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI BENGKULU



**ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2024			REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	ANALISIS EFISIENSI
			Uraian (RO/Komponen)	DIPA	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Gaji dan Tunjangan	01	19.087.214.000	19.076.163.053	100%	99,94%	0,06%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 0,14% dalam mencapai kinerja 100% pada Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2.990.104.000	2.973.388.653	100%	99,44%	0,56%	
			Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung	01	522.000.000	519.284.219	100%	99,48%	0,52%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	90.000.000	89.685.000	100%	99,65%	0,35%	
			Jumlah		22.689.318.000	22.658.520.925	100%	99,86%	0,14%	
2		Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Gaji dan Tunjangan	01	19.087.214.000	19.076.163.053	100%	99,94%	0,06%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 0,14% dalam mencapai kinerja 100% pada Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2.990.104.000	2.973.388.653	100%	99,44%	0,56%	
			Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung	01	522.000.000	519.284.219	100%	99,48%	0,52%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	90.000.000	89.685.000	100%	99,65%	0,35%	
			Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	75.551.000	75.114.500	100%	99,42%	0,58%	
Jumlah		22.764.869.000	22.733.635.425	100%	99,86%	0,14%				
3		Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Gaji dan Tunjangan	01	19.087.214.000	19.076.163.053	100%	99,94%	0,06%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 0,14% dalam mencapai kinerja 100% pada Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2.990.104.000	2.973.388.653	100%	99,44%	0,56%	
			Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung	01	522.000.000	519.284.219	100%	99,48%	0,52%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	90.000.000	89.685.000	100%	99,65%	0,35%	
			Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	15.749.000	15.649.000	100%	99,37%	0,63%	
Jumlah		22.705.067.000	22.674.169.925	100%	99,86%	0,14%				
4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Gaji dan Tunjangan	01	19.087.214.000	19.076.163.053	107,31%	99,94%	6,87%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 6,94% dalam mencapai kinerja 111,60% pada Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2.990.104.000	2.973.388.653	107,31%	99,44%	7,33%	
			Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung	01	522.000.000	519.284.219	107,31%	99,48%	7,30%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	90.000.000	89.685.000	107,31%	99,65%	7,14%	
			Jumlah		22.689.318.000	22.658.520.925	107,31%	99,86%	6,94%	

5		Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas dengan Layanan Peradilan	Gaji dan Tunjangan	01	19.087.214.000	19.076.163.053	101,02%	99,94%	1,07%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 1,14% dalam mencapai kinerja 101,02% pada Indikator Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas dengan Layanan Peradilan
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2.990.104.000	2.973.388.653	101,02%	99,44%	1,56%	
			Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung	01	522.000.000	519.284.219	101,02%	99,48%	1,52%	
			Jumlah		22.599.318.000	22.568.835.925	101,02%	99,87%	1,14%	
6	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Gaji dan Tunjangan	01	19.087.214.000	19.076.163.053	100%	99,94%	0,06%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 0,14% dalam mencapai kinerja 100% pada Indikator Kinerja Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2.990.104.000	2.973.388.653	100%	99,44%	0,56%	
			Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung	01	522.000.000	519.284.219	100%	99,48%	0,52%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	90.000.000	89.685.000	100%	99,65%	0,35%	
			Jumlah		22.689.318.000	22.658.520.925	100%	99,86%	0,14%	
7		Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Gaji dan Tunjangan	01	19.087.214.000	19.076.163.053	100%	99,94%	0,06%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 0,14% dalam mencapai kinerja 100% pada Indikator Kinerja Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2.990.104.000	2.973.388.653	100%	99,44%	0,56%	
			Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung	01	522.000.000	519.284.219	100%	99,48%	0,52%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	90.000.000	89.685.000	100%	99,65%	0,35%	
			Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	75.551.000	75.114.500	100%	99,42%	0,58%	
Jumlah		22.764.869.000	22.733.635.425	100%	99,86%	0,14%				
8		Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Gaji dan Tunjangan	01	19.087.214.000	19.076.163.053	100%	99,94%	0,06%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 0,14% dalam mencapai kinerja 100% pada Indikator Kinerja Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2.990.104.000	2.973.388.653	100%	99,44%	0,56%	
			Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung	01	522.000.000	519.284.219	100%	99,48%	0,52%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	90.000.000	89.685.000	100%	99,65%	0,35%	
			Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	15.749.000	15.649.000	100%	99,37%	0,63%	
Jumlah		22.705.067.000	22.674.169.925	100%	99,86%	0,14%				



Bengkulu, 10 Januari 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

D. LILIK MULYADI, S.H., M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
#melayani
#bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN 4

DAMPAK BUDAYA KINERJA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

PERUBAHAN BUDAYA KINERJA MEMBAWA DAMPAK PENINGKATAN KINERJA

Budaya Kinerja pada Pengadilan tinggi Bengkulu telah berubah menjadi ke arah yang lebih baik dari pada budaya kinerja sebelumnya, dan sebagai indikator mengukur variabel budaya kerja dalam hal ini terkait kolaboratif (bagian dari core value BerAKHLAK), 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sopan) dan Keterbukaan(Bagian dari 8 Nilai Utama Mahkamah Agung).

1. Variabel Kolaboratif

Budaya Kerja	Identifikasi Kendala Kinerja	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
Kolaboratif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Kepercayaan kepada orang lain / Unit Kerja. 2. Adanya Konflik Pribadi pada Unit Kerja. 3. Munculnya Persaingan antar Individu. 4. Adanya perbedaan Pandangan/Kepribadian. 5. Kurang lancarnya Komunikasi. 6. Kekurang pahaman Pelaksanaan Tupoksi untuk mencapai Tujuan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diadakan Rapat Koordinasi dengan Unit terkait 2. Dalam setiap apel di lakukan Pengucapan 8 (delapan) Nilai Utama Mahkamah Agung 3. Dalam Rapat Dinas Bulanan dilakukan pembinaan 4. Pembuatan poster dan pemuatan Core Value ASN Ber Akhlak dalam media informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya Kolaboratif yang lebih baik 2. terselesaikannya Laporan-Laporan Kinerja seperti Laporan Kegiatan, Laporan Keuangan, Laporan BMN, LKJIP dan lain-lain. 3. Terpublikasikannya Core Value ASN BerAKHLAK melalui poster dan website/videotron

2. Variabel 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)

Budaya Kerja	Identifikasi Kendala Kinerja	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
5 (S) Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun, (pemberian Pelayanan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman pentingnya penerapan budaya kinerja 5 S. 2. Kurangnya pemahaman/ pengetahuan sebagai aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik. 3. Kurangnya implementasi core value ASN BerAKHLAK (terkait pelayanan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Apel pagi Senin dan Jum'at sore selalu diingatkan tentang pentingnya pemberian pelayanan terbaik kepada Masyarakat (Penerapan 5 S) 2. Setiap Apel Senin pagi dan Jum'at sore selalu dilakukan Pengucapan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI dan Asn BerAHLAK. 3. Rapat Dinas Bulanan dan setiap ada acara Kedinasan seperti Pelantikan , diingatkan tentang penerapan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI dan ASN BerAHLAK. 4. Dilakukan BIMTEK <ol style="list-style-type: none"> a. Tentang pelayanan terbaik kepada Masyarakat, spt Kerjasama dengan BSI Cabang Bengkulu, dan Dinas Sosial Kota Bengkulu (khususnya penyandang disabilitas). b. Briefing rutin terhadap Petugas PTSP. c. Pembuatan poster dan media informasi tentang Core Value ASN BerAKHLAK(5S) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan menjadi lebih dan humanis. 2. Tidak adanya pengaduan dari Masyarakat terhadap pelayanan PT Bengkulu. 3. Terpublikasinya core value ASN BerAKHLAK (5S) melalui poster dan media informasi

3. Variabel Keterbukaan

Budaya Kerja	Identifikasi Kendala Kinerja	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
Keterbukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman tentang keterbukaan informasi pada lembaga peradilan. 2. Keterbatasan pengetahuan dari pengguna informasi tentang informasi terkait peradilan. 3. Keterbatasan anggaran untuk sosialisasi ke masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi internal tentang keterbukaan informasi seperti SK Ketua MA No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 dan aturan lainnya. 2. Melakukan Inovasi (karena keterbatasan anggaran) melakukan : <ol style="list-style-type: none"> a) sosialisasi eksternal kepada advokat (pada acara setelah pengambilan sumpah Advokat) tentang standar pelayanan informasi publik di Pengadilan, e- Court dll b) menciptakan inovasi secara mandiri ttg keterbukaan informasi spt sipadu dan kapiten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan informasi mulai dipahami dan di implementasikan oleh Aparatur, dan terpublikasikannya melalui website atau media informasi tentang dokumen anggaran, dokumen maklumat pelayanan, mekanisme pengaduan, mekanisme pengajuan informasi, dll 2. Adanya inovasi pelayanan informasi sipadu di ptsp dan kapiten di website. 3. Meningkatnya pengetahuan pengguna layanan/informasi (advokat) tentang layanan peradilan. 4. Sipadu dan kapiten



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
#melayani
#bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN 5

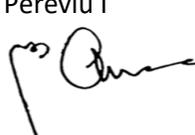
FORMULIR REVIU LKjIP TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

No	Pernyataan	Check list
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting (Instansi Pemerintah) IP. √ 2. LKj telah menyajikan informasi kinerja IP yang memadai. √ 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. √ 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. √ 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. √ 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. √
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. √ 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. √ 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. √ 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. √ 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. √ 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. √ 7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. √
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kerja. √ 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. √ 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. √ 4. Target Indikator Kinerja. √ 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. √ 6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan. √ 7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. √ 8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat. √ 9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran. √ 10. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai. √ 11. IKU dan IK telah SMART √

Bengkulu, 24 Februari 2025

Pereviu I
Pereviu II



ZAINURI, SH., M.H.




SAIMAN, S.H., M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
#melayani
#bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN 6

PENGHARGAAN TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI BENGKULU



PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH DITJEN BADILUM KEPADA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2023

Pemberian Penghargaan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Terbaik Tahun Anggaran 2023 kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Kategori UAPPA-W Laporan Penyusunan Keuangan Tahunan yang berkualitas yang membawahi 10 sampai dengan 18 Pengadilan Negeri pada tanggal 26 Januari 2024.



**ZONA
INTEGRITAS**



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN 7

SK TIM PENYUSUN LJKIP TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI BENGKULU



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NOMOR : 21/W8-U/SK/OT1.6/I/2025

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);

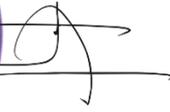
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2025
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

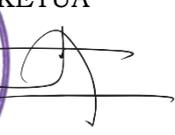
 KETUA

LELIK MULYADI

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Nomor : 21/W8-U/SK/OT1.6/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.
2.	KOORDINATOR VALIDASI DATA	R AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H.
3.	KETUA	YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H.
4.	SEKRETARIAT	1. H. NURSANI, S.H. 2. Drs. ASMAR JOSEN, S.H., M.H.
5.	ANGGOTA	YURNI HENDARWATI, S.Pd
		UMI KALSUM, S.Sos.
		RIZWAN, S.H.
		ZULMAHRI, S.H.
		TURIJAN, S.H.
		ALIDIN, S.H.
		M. ALI EL. FAHMI, S.T.
		RINA ASTUTI, S.E.
		LINDA NORA, S.Kom.
		FIDIYAH SISTONA, S.E.
		DONAL, S.E
		TOMMY AFRIAWAN, S.E
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. ZAINURI, S.H. 2. SAIMAN, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KETUA

LILIK MULYADI

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Nomor : 21/W8-U/SK/OT1.6/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Bagian.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KETUA

LLIK MULYADI